



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, penyelesaian ganti rugi dan pengembalian barang milik daerah, serta melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72018) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan setiap bulan kepada PNS dan Calon PNS sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas dan fungsi jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja; dan/atau
 - b. TPP berdasarkan beban kerja,

dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jumlah akumulasi TPP dan Remunerasi yang diterima oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan Remunerasi, paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TPP tertinggi pada peringkat jabatannya.
- (4) Alokasi Remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan menerapkan Remunerasi paling tinggi 50% (lima puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan capaian penilaian kinerja.

- (2) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada setiap triwulan.
 - (3) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan PNS yang ditetapkan sebagai ketua kelompok dan ketua subkelompok terdiri atas:
 - a. hasil pengukuran kinerja triwulan;
 - b. Aktivitas Kerja; dan
 - c. tindak lanjut pengaduan masyarakat.
 - (4) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP terdiri atas:
 - a. hasil pengukuran kinerja triwulan; dan
 - b. Aktivitas Kerja.
 - (5) Capaian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan hasil pengukuran kinerja setiap bulan.
 - (6) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak diberikan TPP.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Hasil pengukuran kinerja triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang paling lambat tanggal 8 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 4B

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu kepada:
 - a. PNS yang menduduki jabatan administrator;
 - b. PNS yang menduduki jabatan pengawas;
 - c. PNS yang ditetapkan sebagai ketua kelompok; dan
 - d. PNS yang ditetapkan sebagai ketua subkelompok,
 dengan memperhitungkan batas waktu kerja normal sebesar akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan batas waktu kerja pada bulan Ramadan sebesar akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif.

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan cuti tahunan, cuti alasan penting kurang dari 5 (lima) hari secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, perjalanan dinas, melaksanakan tugas di luar kantor dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan capaian waktu kerja normal sebesar 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja atau sebesar 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja pada bulan Ramadan.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan.
 - (5) PNS yang menerima TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan biaya perjalanan dinas dalam kota yang bersumber dari APBD.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 - 1. teguran lisan, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
 - 2. teguran tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
 - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan; dan
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan.

- (2) Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin disampaikan kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikutnya setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.
 - (4) Dalam hal penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah/Biro yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.
5. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PEMOTONGAN TPP KARENA KEWAJIBAN PENCEGAHAN KORUPSI

Pasal 33A

- (1) PNS yang menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada masa laporan berkala melewati batas waktu pelaporan periodik, dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih bulan April yang akan diterima pada bulan Mei.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data PNS yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (3) BKD melakukan rekonsiliasi data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan konfirmasi Kepala Perangkat Daerah/Biro.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Biro yang tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pemotongan TPP PNS di bawah koordinasinya.

Pasal 33B

PNS yang melaporkan gratifikasi yang diterima melewati batas waktu pelaporan dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak diterimanya laporan.

Pasal 33C

- (1) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban ganti rugi dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak tidak melaksanakan kewajiban dalam putusan penyelesaian ganti rugi.

- (2) BPKD melaporkan rekapitulasi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada BKD.
- (3) Kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33D

- (1) PNS yang tidak mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai tanpa hak dikenakan potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya sejak putusan pengembalian barang milik daerah ditetapkan sampai dengan PNS yang bersangkutan mengembalikan barang milik daerah.
 - (2) BPAD melaporkan rekapitulasi PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada BKD.
 - (3) Pengembalian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembayaran kekurangan TPP dilakukan apabila terjadi:
 - a. kegagalan/gangguan sistem informasi TPP;
 - b. bencana atau keadaan di luar kemampuan manusia;
 - c. kesalahan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi:
 - 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan;
 - 2. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas Kerja harian; dan/atau
 - d. Pejabat pengelola kepegawaian lalai tidak memberikan keterangan ketidakhadiran dan/atau melakukan pengaturan *shift* jam kerja khusus melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (3) Pembayaran kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfotik.

7. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan pada Perangkat Daerah melalui surat permintaan yang ditandatangani oleh Gubernur diberikan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima TPP dan/atau tunjangan lain yang dipersamakan dengan TPP dari instansi asal.

8. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Apabila batas waktu validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan Pasal 7 ayat (1) terlampaui, dapat dilakukan validasi susulan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TPP yang mengakibatkan validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau
 - b. kesalahan yang dilakukan oleh atasan langsung meliputi:
 1. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan; dan/atau
 2. tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas Kerja.
- (2) Apabila batas waktu pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terlampaui, dapat dilakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terjadi kegagalan/gangguan pada sistem informasi TPP yang mengakibatkan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus tidak dapat dilaksanakan tepat waktu; atau
 - b. pejabat pengelola kepegawaian lalai tidak melakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus.
- (3) Validasi kinerja triwulan dan Aktivitas Kerja atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan validasi atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan kepada Kepala BKD;
 - b. atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian membuat surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- c. surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima oleh BKD paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan dilakukannya validasi kinerja triwulan dan Aktifitas Kerja atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus.
- (4) Validasi atau pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.
- (5) Terhadap atasan langsung yang tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan dan/atau Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau pejabat pengelola kepegawaian yang melakukan kelalaian dengan tidak melakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhi hukuman berupa potongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan berikutnya.
9. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Ketentuan mengenai validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan dan/atau Aktivitas Kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan pemberian keterangan ketidakhadiran, dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus oleh pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, berlaku juga bagi atasan langsung dan pejabat pengelola kepegawaian yang membawahi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara bersamaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b bersamaan dengan kelalaian terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, penjatuhan hukuman berupa potongan TPP sebesar 5% (lima persen) hanya dikenakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan berkenaan.

Pasal II

1. Koordinator dan subkoordinator mendapatkan besaran TPP Jabatan Administrasi sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 51027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP

A. TPP Prestasi Kerja

1. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok.

| No | Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|--|---|--|---------------|-----------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah | 17 | 127.710.000 |
| | | Asisten Sekda | 15a | 63.900.000 |
| | Biro Pemerintahan | Kepala Biro | 14a | 55.170.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | | | | |
| | Biro Hukum | Kepala Biro | 14a | 55.170.000 |
| | | Kepala Bagian | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | Kepala Biro | 14a | 55.170.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Kepala Daerah | Kepala Biro | 14a | 55.170.000 |
| | | Kepala Bagian | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah | Kepala Biro | 14a | 55.170.000 |
| | | Kepala Bagian | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Perekonomian dan Keuangan | Kepala Biro | 14b | 51.570.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok | 12d | 39.960.000 |
| Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | | 9b | 26.190.000 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----|------------|
| | Biro Kerja Sama Daerah | Kepala Biro | 14b | 51.570.000 |
| | | Kepala Bagian | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup | Kepala Biro | 14a | 55.170.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Kesejahteraan Sosial | Kepala Biro | 14b | 51.570.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | Biro Pendidikan dan Mental Spiritual | Kepala Biro | 14b | 51.570.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Kelompok | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| 2 | Inspektorat | Inspektur | 15a | 63.900.000 |
| | | Sekretaris Inspektorat | 12b | 41.220.000 |
| | | Inspektur Pembantu | 12c | 40.770.000 |
| | | Inspektur Pembantu Wilayah Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Inspektorat | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten | 9a | 27.000.000 |
| | | | | |
| 3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kepala Badan | 15b | 63.450.000 |
| | | Wakil Kepala Badan | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota | 9a | 27.000.000 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----|---------------------------|
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kabupaten | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kepala Badan | 15b | 63.450.000 |
| | | Wakil Kepala Badan | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 5 | Badan Pengelolaan Aset Daerah | Kepala Badan | 15b | 63.450.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Suku Badan Kota | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Suku Badan Kabupaten | 9a | 27.000.000 |
| | | | | Kepala Subbagian pada UPT |

| | | | | |
|----|--|---|-----|------------|
| 6 | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah | Kepala Badan | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 7 | Badan Kepegawaian Daerah | Kepala Badan | 15c | 60.480.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota | 9b | 26.190.000 |
| 8 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 9 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kepala Pelaksana | 14b | 51.570.000 |
| | | Kepala Sekretariat | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9c | 25.740.000 |
| 10 | Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | Kepala Badan | 15b | 63.450.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPPBJ | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Subbidang pada Badan | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPPBJ | 9a | 27.000.000 |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Badan | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota | 12e | 39.510.000 |

| | | | | |
|----|--|--|-----|------------|
| | | Kepala Suku Badan Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Suku Badan Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kepala Dinas | 15b | 63.450.000 |
| | | Wakil Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang pada Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kecamatan Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan | 9c | 25.740.000 |
| 13 | Dinas Pendidikan | Kepala Dinas | 15c | 60.480.000 |
| | | Wakil Kepala Dinas | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |

| | | | | |
|----|-----------------|---|-----|------------|
| | | Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah I/Wilayah II | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota Wilayah I/Wilayah II | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada SMANU M. H. Thamrin | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian SMPN/SMAN Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian SMAN/SMKN | 9c | 25.740.000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | Kepala Dinas | 15c | 60.480.000 |
| | | Wakil Kepala Dinas | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 40.770.000 |
| | | Direktur RSU/RSUD Kelas C yang belum menerapkan remunerasi | 12c | 40.770.000 |
| | | Direktur RSUD Kelas D yang belum menerapkan remunerasi/PNS yang ditetapkan sebagai Kepala Puskesmas | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSU/RSUD Kelas C yang belum menerapkan remunerasi | 11d | 33.930.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|-----|------------|
| | | Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Kelas D yang belum menerapkan remunerasi | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Puskesmas | 9b | 26.190.000 |
| | | PNS yang ditetapkan sebagai Kepala Puskesmas Kelurahan/Puskesmas Pembantu | 8a | 23.580.000 |
| 15 | Dinas Perhubungan | Kepala Dinas | 15c | 60.480.000 |
| | | Wakil Kepala Dinas | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala UPT | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | Kepala Dinas | 15c | 60.480.000 |
| | | Wakil Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala UPT | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 17 | Dinas Bina Marga | Kepala Dinas | 15d | 57.870.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala UPT | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------|
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| 18 | Dinas Sumber Daya Air | Kepala Dinas | 15c | 60.480.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12b | 41.220.000 |
| | | Kepala Bidang | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala UPT | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | 19 | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | Kepala Dinas |
| Sekretaris Dinas | 12b | | | 41.220.000 |
| Kepala Bidang | 12d | | | 39.960.000 |
| Kepala UPT | 12d | | | 39.960.000 |
| Kepala Suku Dinas Kota | 12d | | | 39.960.000 |
| Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12d | | | 39.960.000 |
| Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada UPT | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Sektor Dinas pada Kecamatan | 9b | | | 26.190.000 |
| 20 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | Kepala Dinas |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada UPT | 9b | 26.190.000 |

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 21 | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan | Kepala Dinas | 15d | 57.870.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang pada Dinas | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala UPT | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan | 9b | 26.190.000 |
| | | 22 | Dinas Sosial | Kepala Dinas |
| Sekretaris Dinas | 12c | | | 40.770.000 |
| Kepala Bidang | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala UPT | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala Suku Dinas Sosial Kota | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada UPT | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | | | 26.190.000 |
| 23 | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|-----|------------|
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 | | |
| 24 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 | | |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 | | |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 | | |
| 25 | Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 | | |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 | | |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | 39.510.000 | | |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 | | |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 | | |
| | | 26 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| Kepala Bidang | 12e | | | 39.510.000 | | |
| Kepala UPT | 12e | | | 39.510.000 | | |
| Kepala Suku Dinas Kota | 12e | | | 39.510.000 | | |
| Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | | | 39.510.000 | | |
| Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Bidang Dinas | 9a | | | 27.000.000 | | |

| | | | | |
|----|--|--|-----|------------|
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Sekretariat Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan | 9c | 25.740.000 |
| 27 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala UPT | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 28 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian-pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 29 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|------------------|--------------|
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| 30 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | 31 | Dinas Kebudayaan | Kepala Dinas |
| Sekretaris Dinas | 12c | | | 40.770.000 |
| Kepala Bidang | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala UPT | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala Suku Dinas Kota | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala Suku Dinas Kabupaten | 12e | | | 39.510.000 |
| Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada UPT | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | | | 26.190.000 |
| Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | | | 26.190.000 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----|------------|
| | | Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 32 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kepala Dinas | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 33 | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota | Kepala Dinas | 14a | 55.170.000 |
| | | Sekretaris Dinas | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Suku Dinas Kota | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala UPT | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Dinas | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan | 9a | 27.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 26.190.000 |
| 34 | Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Satuan | 15d | 57.870.000 |
| | | Wakil Kepala Satuan | 14d | 50.670.000 |
| | | Sekretaris | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bidang | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten | 12d | 39.960.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan | 9b | 26.190.000 |

| | | | | |
|----|---|--|-----|------------|
| 35 | Sekretariat DPRD | Sekretaris DPRD | 14b | 51.570.000 |
| | | Kepala Bagian | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian | 9b | 26.190.000 |
| 36 | Kota Administrasi | Walikota | 15c | 60.480.000 |
| | | Wakil Walikota | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Kota | 14c | 51.120.000 |
| | | Asisten Sekretaris Kota | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bagian | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian/ PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| 37 | Kabupaten Administrasi | Bupati | 15c | 62.370.000 |
| | | Wakil Bupati | 14b | 51.570.000 |
| | | Sekretaris Kabupaten | 14c | 51.120.000 |
| | | Asisten Sekretaris Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten | 12c | 40.770.000 |
| | | Kepala Bagian pada Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Kabupaten/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Unit Kerja Teknis Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| 38 | Kecamatan | Camat pada Kota/ Kabupaten | 12d | 39.960.000 |
| | | Wakil Camat pada Kota/ Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Sekretaris Kecamatan pada Kota/ Kabupaten | 12e | 39.510.000 |
| | | Kepala Seksi pada Kecamatan Kota | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Kecamatan Kota | 9c | 25.740.000 |
| | | Kepala Subbagian pada Kecamatan Kabupaten | 9c | 25.740.000 |
| 39 | Kelurahan | Lurah pada Kota/ Kabupaten | 9a | 27.000.000 |
| | | Sekretaris Kelurahan pada Kota/ Kabupaten | 9b | 26.190.000 |
| | | Kepala Seksi-pada Kelurahan Kota/ Kabupaten | 9c | 25.740.000 |
| 40 | Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal/ Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | Koordinator/Ketua/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi /Satuan Pengawas Internal / Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan | 8b | 23.310.000 |
| 41 | Satuan Pelaksana pada SMPN | Ketua Satuan Pelaksana pada SMPN | 8d | 20.160.000 |
| 42 | Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Gelanggang | Ketua Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Gelanggang | 8d | 20.160.000 |

2. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Teknis Ahli | 7 | 19.710.000 |
| 2 | Teknis Terampil | 7 | 17.370.000 |
| 3 | Administrasi Ahli | 6 | 15.300.000 |
| 4 | Administrasi Terampil | 6 | 13.500.000 |
| 5 | Operasional Ahli | 5 | 11.610.000 |
| 6 | Operasional Terampil | 5 | 9.810.000 |
| 7 | Pelayanan Ahli | 4 | 8.010.000 |
| 8 | Pelayanan Terampil | 4 | 7.470.000 |
| 9 | Calon PNS | 2 | 4.860.000 |

3. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Perencana dan Dokter

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 33.030.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 28.710.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 23.850.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 19.620.000 |
| 5 | Keterampilan Penyelia | 7 | 19.620.000 |
| 6 | Keterampilan Mahir | 7 | 17.370.000 |
| 7 | Keterampilan Terampil | 7 | 16.830.000 |
| 8 | Keterampilan Pemula | 6 | 14.760.000 |

4. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Selain Auditor, Perencana dan Dokter

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 31.770.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 26.550.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 23.580.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 18.720.000 |
| 5 | Keterampilan Penyelia | 7 | 18.720.000 |
| 6 | Keterampilan Mahir | 7 | 17.190.000 |
| 7 | Keterampilan Terampil | 7 | 16.560.000 |
| 8 | Keterampilan Pemula | 6 | 12.960.000 |

5. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/ Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah

| No | Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|------------------------|---|--|---------------|-----------------|
| 1 | Badan Pendapatan Daerah | Kepala Badan | 15b | 42.300.000 |
| | | Wakil Kepala Badan | 14a | 36.780.000 |
| | | Sekretaris Badan | 12b | 27.480.000 |
| | | Kepala Bidang | 12c | 27.180.000 |
| | | Kepala UPT | 12c | 27.180.000 |
| | | Kepala UPPPD Wilayah | 12c | 27.180.000 |
| | | Kepala UPPPD Kabupaten | 12d | 26.640.000 |
| | | Kepala UPPPD Kecamatan | 12d | 26.640.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota | 12c | 27.180.000 |
| | | Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 12c | 27.180.000 |
| | | Kepala Subbagian/Subbidang/PNS yang ditetapkan sebagai Ketua Subkelompok pada Badan | 9a | 18.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/Subbidang pada Suku Badan Kota | 9a | 18.000.000 |
| | | Kepala Subbagian/Subbidang pada Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 9a | 18.000.000 |
| | | Kepala Subbagian pada UPT | 9b | 17.460.000 |
| Ketua Satuan Pelaksana | 7 | 19.710.000 | | |

6. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

- A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Administrator/Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1 | Direktur | 14b | 37.245.000 |
| 2 | Wakil Direktur | 14d | 36.595.000 |
| 3 | Kepala Bagian | 12c | 29.445.000 |
| 4 | Kepala Bidang | 12c | 29.445.000 |
| 5 | Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal | 8b | 16.835.000 |

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1 | Direktur | 14d | 36.595.000 |
| 2 | Wakil Direktur | 12c | 29.445.000 |
| 3 | Kepala Bagian | 12d | 28.860.000 |
| 4 | Kepala Bidang | 12d | 28.860.000 |
| 5 | Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal | 8b | 16.835.000 |

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 23.855.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 20.735.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 17.225.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 14.170.000 |

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 22.945.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 19.175.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 17.030.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 13.520.000 |
| 5 | Keterampilan Penyelia | 7 | 13.520.000 |
| 6 | Keterampilan Mahir | 7 | 12.415.000 |
| 7 | Keterampilan Terampil | 7 | 11.960.000 |
| 8 | Keterampilan Pemula | 6 | 9.360.000 |

E. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Teknis Ahli | 7 | 14.235.000 |
| 2 | Teknis Terampil | 7 | 12.545.000 |
| 3 | Administrasi Ahli | 6 | 11.050.000 |
| 4 | Administrasi Terampil | 6 | 9.750.000 |
| 5 | Operasional Ahli | 5 | 8.385.000 |
| 6 | Operasional Terampil | 5 | 7.085.000 |
| 7 | Pelayanan Ahli | 4 | 5.785.000 |
| 8 | Pelayanan Terampil | 4 | 5.395.000 |
| 9 | Calon PNS | 2 | 3.510.000 |

7. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS dan Calon PNS yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1 | Direktur | 12c | 33.975.000 |
| 2 | Kepala Bagian/Bidang | 11d | 28.275.000 |
| 3 | Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal | 8 | 19.425.000 |

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 27.525.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 23.925.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 19.875.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 16.350.000 |

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 26.475.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 22.125.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 19.650.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 15.600.000 |
| 5 | Keterampilan Penyelia | 7 | 15.600.000 |
| 6 | Keterampilan Mahir | 7 | 14.325.000 |
| 7 | Keterampilan Terampil | 7 | 13.800.000 |
| 8 | Keterampilan Pemula | 6 | 10.800.000 |

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Teknis Ahli | 7 | 16.425.000 |
| 2 | Teknis Terampil | 7 | 14.475.000 |
| 3 | Administrasi Ahli | 6 | 12.750.000 |
| 4 | Administrasi Terampil | 6 | 11.250.000 |
| 5 | Operasional Ahli | 5 | 9.675.000 |
| 6 | Operasional Terampil | 5 | 8.175.000 |
| 7 | Pelayanan Ahli | 4 | 6.675.000 |
| 8 | Pelayanan Terampil | 4 | 6.225.000 |
| 9 | Calon PNS | 2 | 4.050.000 |

8. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP yang Bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Khusus Daerah

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|---|---------------|-----------------|
| 1 | Direktur | 14d | 42.225.000 |
| 2 | Wakil Direktur | 12c | 33.975.000 |
| 3 | Kepala Bagian | 12d | 33.300.000 |
| 4 | Kepala Bidang | 12d | 33.300.000 |
| 5 | Koordinator/Kepala pada Satuan Pelaksana/ Instalasi/ Satuan Pengawas Internal | 8b | 19.425.000 |

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 27.525.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 23.925.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 19.875.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 16.350.000 |

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Keahlian Utama | 10 | 26.475.000 |
| 2 | Keahlian Madya | 9 | 22.125.000 |
| 3 | Keahlian Muda | 8 | 19.650.000 |
| 4 | Keahlian Pertama | 7 | 15.600.000 |
| 5 | Keterampilan Penyelia | 7 | 15.600.000 |
| 6 | Keterampilan Mahir | 7 | 14.325.000 |
| 7 | Keterampilan Terampil | 7 | 13.800.000 |
| 8 | Keterampilan Pemula | 6 | 10.800.000 |

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Teknis Ahli | 7 | 16.425.000 |
| 2 | Teknis Terampil | 7 | 14.475.000 |
| 3 | Administrasi Ahli | 6 | 12.750.000 |
| 4 | Administrasi Terampil | 6 | 11.250.000 |
| 5 | Operasional Ahli | 5 | 9.675.000 |
| 6 | Operasional Terampil | 5 | 8.175.000 |
| 7 | Pelayanan Ahli | 4 | 6.675.000 |
| 8 | Pelayanan Terampil | 4 | 6.225.000 |
| 9 | Calon PNS | 2 | 4.050.000 |

9. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Diberikan Tugas Sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|--|---------------|-----------------|
| 1 | PPK Infrastruktur Khusus | 14 | 52.740.000 |
| 2 | Unsur Teknis pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus Grade A | 9 | 28.710.000 |
| 3 | Unsur Teknis pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus Grade B | 7 | 19.710.000 |
| 4 | Unsur Administrasi pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus | 6 | 15.300.000 |

10. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Ditugaskan pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | Ketua Bidang | 12b | 41.220.000 |
| 2 | Anggota Grade 1 | 12c | 40.770.000 |
| 3 | Anggota Grade 2 | 9a | 27.000.000 |

11. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Deputy Gubernur dan Asisten Deputy Gubernur

| No | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|-------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Deputi Gubernur | 16b | 69.840.000 |
| 2 | Asisten Deputy Gubernur | 14d | 50.220.000 |

12. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Diperbantukan/Dipekerjakan/Ditugaskan pada Sekretariat Bawaslu Daerah

| No | Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah | Nama Jabatan | Kelas Jabatan | Jumlah TPP (Rp) |
|----|---|--------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Sekretariat Bawaslu Daerah | Kepala Sekretariat | 11d | 33.930.000 |
| | | Kepala Bagian | 11e | 33.390.000 |
| | | Kepala Subbagian | 9c | 25.740.000 |

B. TPP Beban Kerja

| No | Nama Jabatan | Besaran (Rp) Golongan III | Besaran (Rp) Golongan IV |
|----|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Sekretaris pada: a. Inspektorat; b. Dinas; c. Badan; dan d. Satuan Polisi Pamong Praja. | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 2 | Inspektur Pembantu Provinsi | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 3 | Kepala Sekretariat Pelaksana BPBD | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 4 | Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 5 | Kepala Bidang/Bagian/Ketua Kelompok pada: a. Dinas; b. Badan; c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan d. Biro Sekretariat Daerah. | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 6 | Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi | 6.175.000 | 5.525.000 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 7 | Direktur RSU | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 8 | Wakil Direktur RSKD/RSUD Kelas B | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 9 | Kepala Bagian/Kepala Bidang pada : a. RSU; b. RSKD; c. RSUD Kelas A; dan d. RSUD Kelas B. | 6.175.000 | 5.525.000 |
| 10 | Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 11 | Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 12 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 13 | Kepala Suku Dinas / Suku Badan | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 14 | Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 15 | Kepala Bagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 16 | Kepala Unit Kerja Teknis pada Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 17 | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota/Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 18 | Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota/ Kabupaten | 5.700.000 | 5.100.000 |
| 19 | Camat | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 20 | Wakil Camat | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 21 | Sekretaris Kecamatan | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 22 | Direktur RSUD Kelas C/Kelas D | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 23 | Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSUD Kelas C | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 24 | Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah/Kabupaten/Kecamatan | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 25 | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 26 | Kepala Puskesmas | 5.225.000 | 4.675.000 |
| 27 | Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/Ketua Subkelompok pada : a. Inspektorat; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas; d. Badan; e. Satuan Polisi Pamong Praja; f. Sekretariat Daerah; dan g. UPT Provinsi. | 3.800.000 | 3.400.000 |
| 28 | Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi/Ketua Subkelompok pada : a. Sekretariat Kota/Kabupaten; b. Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten; c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten; d. Suku Badan; e. Suku Dinas; f. Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; g. UPT Kota/Kabupaten; dan h. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten. | 3.325.000 | 2.975.000 |

| | | | |
|----|---|-----------|-----------|
| 29 | Kepala Seksi Unit Kerja Teknis pada Kabupaten | 3.325.000 | 2.975.000 |
| 30 | Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD Kelas D | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 31 | Kepala Subbagian pada Puskesmas | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 32 | Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 33 | Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 34 | Kepala Subbagian pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah/Kabupaten/Kecamatan | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 35 | Kepala Subbagian/Seksi pada Kecamatan | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 36 | Kepala Sektor pada Kecamatan | 2.850.000 | 2.550.000 |
| 37 | Lurah | 2.375.000 | 2.125.000 |
| 38 | Sekretaris Kelurahan | 2.375.000 | 2.125.000 |
| 39 | Kepala Seksi pada Kelurahan | 2.375.000 | 2.125.000 |
| 40 | Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kelurahan | 2.375.000 | 2.125.000 |
| 41 | Kepala Subbagian pada : a. SMAN/SMKN; b. SMAN Unggulan M. H. Thamrin; dan c. SMPN-SMAN Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar. | 2.375.000 | 2.125.000 |

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Perangkat Daerah :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa

1. pada bulan.....tahun.....saya tidak melakukan kewajiban saya yaitu tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh kinerja triwulan/tidak melakukan validasi sebagian atau seluruh Aktivitas kerja/tidak melakukan pemberian keterangan ketidakhadiran dan/atau pengaturan *shift* jam kerja khusus *) karena suatu kelalaian;
2. saya bersedia menerima sanksi pemotongan TPP dan tidak akan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. jika saya mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia dikenakan sanksi hukuman disiplin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

meterai cukup

(nama lengkap)

NIP

*) coret yang tidak perlu

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO